

Judul : Misbakhun: Jokowi kelola anggaran dengan transparan
Tanggal : Senin, 11 Februari 2019
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 7

Bantah Pernyataan Prabowo Misbakhun: Jokowi Kelola Anggaran Dengan Transparan

ANGGOTA Komisi XI DPR Mukhammad Misbakhun mengkritisi pernyataan Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto soal kebocoran APBN hingga 25 persen. Menurutnya, pernyataan Prabowo tanpa data yang jelas dan valid. Dia pun menantang Prabowo membuktikan ucapannya itu.

"Pendapat Pak Prahowo yang mengatakan ada kebocoran anggaran APBN sebesar 25 persen harus dibuktikan secara faktual. Masa ketua umum partai menyebutkan angka kebocoran, tapi tidak bisa membuktikan apa pun," ujar Misbakhun, dalam keterangan tertulisnya, kemarin.

Politisi muda Partai Golkar ini mendesak Prabowo segera mengeluarkan berbagai bukti yang memperkuat tudingan tersebut. Misbakhun mengaku agak geregetan dengan ulah Prabowo yang kerap melontarkan pernyataan tanpa bukti. Alhasil, tudingan itu hanya membuat kegaduhan dan rumor di ruang publik, namun akhirnya menguap begitu saja.

"Di mana faktanya? Kalau memang ada kebocoran keuangan negara, ya harus ada proses hukum dong. Siapa pelakunya? Tudingan kebocoran anggaran sebesar 25 persen dari APBN, jumlahnya sangat besar," ucapnya.

Misbakhun melihat, pengelolaan keuangan Pemerintah selama ini sudah baik. Buktinya, untuk laporan keuangan tahun 2016 dan 2017, Pemerintah Pusat memperoleh predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK. Predikat WTP itu

merupakan prestasi sekaligus pengakuan terhadap komitmen pemerintahan Jokowi dalam memujudkan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel.

"Ini capaian pertama dalam sejarah Republik Indonesia. Sejak Undang-Undang Nomor 17/2003 tentang Keuangan Negara," ungkap Ketua Departemen Pengawasan Pembangunan DPP Partai Golkar ini.

Misbakhun menambahkan, Presiden Jokowi, memiliki kemampuan, bahkan telah membuktikan tata kelola pemerintahan yang kredibel. Pemerintahan Jokowi selalu berupaya dan konsisten dalam menunjukkan tata cara penggunaan anggaran yang transparan dan akuntabel.

"Bahkan, penggunaan anggaran di APBN bisa diakses oleh masyarakat. Pemerintahan Pak Jokowi menggunakan anggaran demi menyejahterakan masyarakat. Dan itu sudah terbukti," klaimnya.

Karena itu, Misbakhun menantang tim pemenang Prabowo untuk membantu capres nomor 02 mencari bukti soal kebocoran APBN hingga 25 persen. Anak buah Prabowo yang ada di DPR juga dapat dikerahkan untuk membantu ketua umumnya dalam menelusuri kebocoran anggaran yang jumlahnya sangat besar itu.

"Kalau cuma melemparkan rumor, apa pantas, apa patut? Masak seorang pemimpin mengutarakan pendapatnya di ruang publik tanpa didasari bukti, bukti yang kuat, faktual, dan konkret?" sesal mantan pegawai pajak itu. ■ ONI